



PENGADILAN AGAMA BIMA

Kelas 1-B

Jln. Gatot Subroto No. 10 Raba-Bima 84115 Telp. (0374) 43209 Fax. 45156

e-mail bima_pa@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Allahmdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah SWT, rasa syukur atas nikmat, rahmat dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kedalam kalbu hambaNya, sehingga reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bima dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Indikator Kinerja Utama ini disusun sebagai satu alur pikir system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama ini berisi indikator-indikator dari sasaran yang hendak dicapai. Indikator Kinerja Utama ini sangat penting artinya dalam rangka mengukur tingkat capaian sasaran, dan diharapkan kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Bima agar dapat melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan idengan sebaik-baiknya dengan pendekatan prestasi kerja yang dicapai. Semoga dengan adanya indikator Kinerja Utama ini maka sasaran akan dapat dicapai pada akhir tahun nanti.

Pengadilan Agama Bima, telah menunjuk Tim Penyusun LKjIP, dan dokumen perencanaan kinerja lainnya, termasuk dokumen Indikator Kinerja Utama. Dokumen ini telah dilakukan reviu untuk menguatkan pencapaian indicator kinerja utama agar dokumen IKU benar-benar menjadi acuan dalam peningkatan kinerja.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama ini.

Bima, 8 Januari 2019

PENGADILAN AGAMA BIMA,

Wakil Ketua

Drs. H. MUHIDIN, MH.
NIP. 19631231.199403.1.040

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
PENGADILAN AGAMA BIMA**

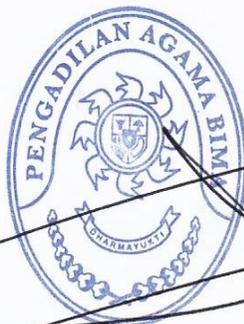
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ <p>Catatan : T_n = sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = sisa perkara tahun sebelumnya Sisa perkara adalah perkara yg belum diputus pada tahun berjalan</p>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Porsentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Upaya hukum adalah Banding, Kasasi dan PK Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	<p style="text-align: center;">Indeks kepuasan pencari keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN No. Kep/25/M.PAN/2/2001 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat</p>	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan tahunan

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Porsentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Porsentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi	$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan lewat mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dimediasi}} \times 100\%$ <i>Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Porsentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yg dimohonkan banding, kasasi, PK}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Porsentase putusan yang menarik perhatian masyarakat, yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan yang upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Porsentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <i>Catatan : PERMA no. 1 tahun 2014, pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Porsentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : PERMA NO.1 Tahun 2014 Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling.</p>	Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Porsentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Porsentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Porsentase perkara putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT = berkekuatan hukum tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Bima, 8 Januari 2019

PENGADILAN AGAMA BIMA,
Ketua



(Handwritten signature)

DR. H. MUHIDIN., MH.
NIP. 19631231.199403.1.040

